

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, budaya, dan juga udara yang ada. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia. Manusia hendaknya menyadari kalau alam lah yang memberi kehidupan dan penghidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kehidupan manusia tidak lepas dengan berbagai permasalahan dan salah satunya permasalahan sampah. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dikarenakan oleh permasalahan sampah terkait dengan adanya hubungan dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan pola bermasyarakat terhadap perwujudan sampah,

organisasi atau badan pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang diterapkan.

Menurut definisi American Public Health Association, sampah (waste) merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Prof. Dr. H. Arif Sumantri, S.K.M., M.KES , 2017).

Sampah-sampah yang terjadi di sekitar kita di kota-kota besar atau perdesaan dimana ada kegiatan manusia termasuk dalam pengertian sampah yang dimaksud. Yang tidak termasuk atau bukan sampah misalnya kebakaran hutan, dimana abu sisa pembakaran tidak mengganggu hidup manusia. Contoh lain adalah bencana-bencana alam, misalnya meletusnya gunung berapi, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Tetapi bila bencana alam ini mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia, maka benda-benda yang dikelola manusia ini sajalah yang termasuk sampah.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Di Kabupaten Kuningan, sampah masih menjadi masalah utama. Dengan penduduk sekitar 1.113.003, setiap hari warga menghasilkan volume sampah 1.200 ton per hari baik limbah rumah tangga maupun yang dihasilkan dunia usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa persoalan sampah di Kabupaten Kuningan ini perlu adanya perhatian dari pemerintah dan juga kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mengelola sampah sehingga terbentuk Kabupaten bersih yang berdampak baik bagi manusia, apalagi Kabupaten Kuningan kaya akan destinasi wisata sehingga persoalan sampah harus sangat di perhatikan. Maka dari itu, masalah sampah ini tentunya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kuningan saja, akan tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuningan. Pengelolaan sampah yang baik dan benar akan mewujudkan Kabupaten Kuningan yang bersih dan sehat. Bahkan, selain dapat membuat lingkungan yang bersih dan sehat, sampah yang dikelola dengan baik dan benar juga bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Seperti sampah organik atau sampah yang bisa terurai dapat dijadikan sebagai pakan ternak, pupuk, kompos, biogas, dll. Adapun sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik, botol plastik, botol kaca, besi, kardus, kertas, kaleng, ember, tembaga, kuningan, alumunium, dan lain-lain itu juga bisa di daur ulang kembali. Selain bisa di daur ulang, sampah anorganik tersebut juga memiliki nilai jual, maka dari itu banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pemulung atau pengepul sampah.

Permasalahan sampah telah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta ambil bagian dalam pengelolaan sampah diantaranya melalui TPS 3R, dimana TPS 3R sebagai salah satu stimulan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pendayagunaan sampah.

TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah) adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan *Reduce* (pengumpulan) , *Reuse* (pemilahan, penggunaan ulang), dan *Recycle* (pendauran ulang). Pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik akan dijadikan kompos. Tujuannya program ini pemerintah memberikan sarana kepada masyarakat dikawasan permukiman padat diperkotaan atau perdesaan yang ingin melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sesuai dengan pilihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka.

Perbup Nomor 4 Tahun 2010 pasal 6 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan wilayah perkotaan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis pelayanan teknis oleh BPLHD dengan melibatkan peran serta masyarakat; wilayah pedesaan dan sistem pengolahan berbasis masyarakat sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi setiap orang pribadi atau Badan dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan menjelaskan kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan pilihan bidang Energi Sumber Daya Mineral dan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, agar sampah menjadi sesuatu yang menghasilkan nilai ekonomi. Dinas Lingkungan Hidup memiliki program TPS 3R. Sistem ini akan mengurangi, menggunakan, dan mendaur ulang sampah. Pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik akan dijadikan kompos. Tujuannya program ini pemerintah memberikan sarana kepada masyarakat di kawasan permukiman padat dipedesaan atau diperkotaan yang ingin melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang sesuai dengan pilihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka. Jadi, TPS 3R tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat langsung yang dirasakan yaitu pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam membantu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah melalui program TPS 3R. Masyarakat perlu diperlakukan sebagaimana manusia yang memiliki potensi dan mampu untuk berkembang.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program TPS 3R yaitu mengurangi sampah, memilah, serta mendaur ulang sampah dengan alat-alat teknologi yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuningan. Tetapi belum optimal, dikarenakan alat-alat teknologi

tersebut belum sepenuhnya diberikan kepada desa-desa yang melaksanakan program TPS 3R di Kabupaten Kuningan dan kurangnya pelaksana atau pegawai di desa yang melaksanakan program TPS 3R.

Pada dasarnya Kinerja merujuk pengertian sebagai hasil. Dalam konteks hasil, Bernardin (2001, 143) menyatakan bahwa Kinerja merupakan catatan *hasil* yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Dari definisi tersebut, Bernardin menekankan pengertian Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat (*trait*) dan perilaku.

Dengan kata lain, kinerja merupakan hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah melalui TPS 3R belum berjalan optimal, maka pelaksanaan program TPS 3R dalam upaya meningkatkan masyarakat peduli lingkungan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Hasil penelitian yang telah penulis amati di Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, bahwa TPS 3R yang ada disana belum sepenuhnya mendetail atau berjalan dengan lancar. Hal itu disebabkan karena kurangnya pelaksana atau pekerja dan alat-alat teknologi masih belum lengkap di TPS 3R Desa Haurkuning, kemudian simbol 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* masih dalam tahap cita-cita atau harapan yang akan ditempuh. Intinya, TPS 3R di Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan sudah berjalan dan dalam proses pengembangan dalam menjalankan program *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (3R), tetapi belum optimal.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan beberapa permasalahan bahwa program TPS 3R di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan yaitu diantaranya :

1. Pendanaan (biaya operasional)
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, seperti : membuang sampah sembarangan, sedangkan tempat pembuangan sampah sudah disediakan. Sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan di Kabupaten Kuningan.
4. Pelaksanaan program TPS 3R di setiap desa tidak semua berjalan lancar, masih ada beberapa desa yang tidak menjalankan program TPS 3R.
5. Birokrasi pemerintahan di desa/kelurahan

Kemudian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R) Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus di Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah melalui TPS 3R masih belum maksimal dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan akibat sampah dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan masyarakat peduli lingkungan.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah melalui program TPS R3 di Kabupaten Kuningan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program TPS 3R?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dalam kinerja pelaksanaan program TPS 3R?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah melalui program TPS 3R di Kabupaten Kuningan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan program TPS 3R.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dalam kinerja pelaksanaan program TPS 3R.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam bidang kajian ilmu administrasi negara khususnya pada kajian Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program TPS 3R Di Kabupaten Kuningan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dalam upaya meningkatkan masyarakat peduli lingkungan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas bahwa kinerja dapat diartikan merupakan catatan *hasil* yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, kinerja merupakan hasil untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Membicarakan kinerja akan selalu terkait dengan ukuran atau standar kinerja. Ukuran atau standar kinerja terkait dengan parameter-parameter tertentu atau dimensi yang dijadikan dasar atau acuan oleh organisasi untuk mengukur kinerja. Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja dengan baik, banyak pakar atau ahli yang berpendapat tentang standar kinerja yang dapat digunakan, tetapi kebanyakan pendapat bervariasi. Martin dan Bartol (dalam Bohlander, dkk., 2001) menyatakan bahwa standar kinerja seharusnya didasarkan pada pekerjaan, dikaitkan dengan persyaratan yang dijabarkan dari analisis pekerjaan, dan tercermin dalam deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan.

Menurut McDaniel dalam Strain Under Load (2000:2), yang memandang kinerja adalah interaksi antara kemampuan seseorang dengan motivasinya. Berdasarkan pandangan ini, dapat ditegaskan bahwa kinerja merupakan penjumlahan antara kemampuan dan motivasi kerja yang dimiliki seseorang.

Bufford, 1988 (dalam Werther & Davis, 1996:9) menyatakan bahwa untuk menjadi efektif, standar kinerja seharusnya dikaitkan dengan hasil yang diinginkan dari masing-masing pekerjaan. Latham & Wexley, 1981 (dalam Werther dan Davis, 1996) mengemukakan bahwa idealnya penilaian didasarkan pada kinerja aktual dari identifikasi elemen-elemen kritis melalui analisis pekerjaan.

Dimensi atau indikator kinerja merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja. Ukuran-ukuran dijadikan tolok ukur dalam menilai kinerja. Dimensi ataupun ukuran kinerja sangat diperlukan karena

akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai dimensi atau indikator yang menjadi ukuran kinerja adalah sebagai berikut.

Bernardin (2001: 12) menyampaikan ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu :

- a. *Quality* terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan.
- b. *Quantity* terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.
- c. *Timeliness* terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.
- d. *Cost-effectiveness* terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.
- e. *Need for supervision* terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan.
- f. *Interpersonal impact* terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerjasama di antara sesama pekerja dan anak buah.

Pada konteks kinerja organisasi publik, Lembaga Administrasi Negara/LAN (2000) telah mengembangkan konsep dan ukuran kinerja cukup operasional. Menurut LAN (2000 : 19), pengukuran kinerja merupakan suatu

alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, LAN menetapkan 5 indikator organisasi yang telah dijadikan pedoman dan panduan bagi organisasi publik dalam menyusun laporan kinerja, yaitu :

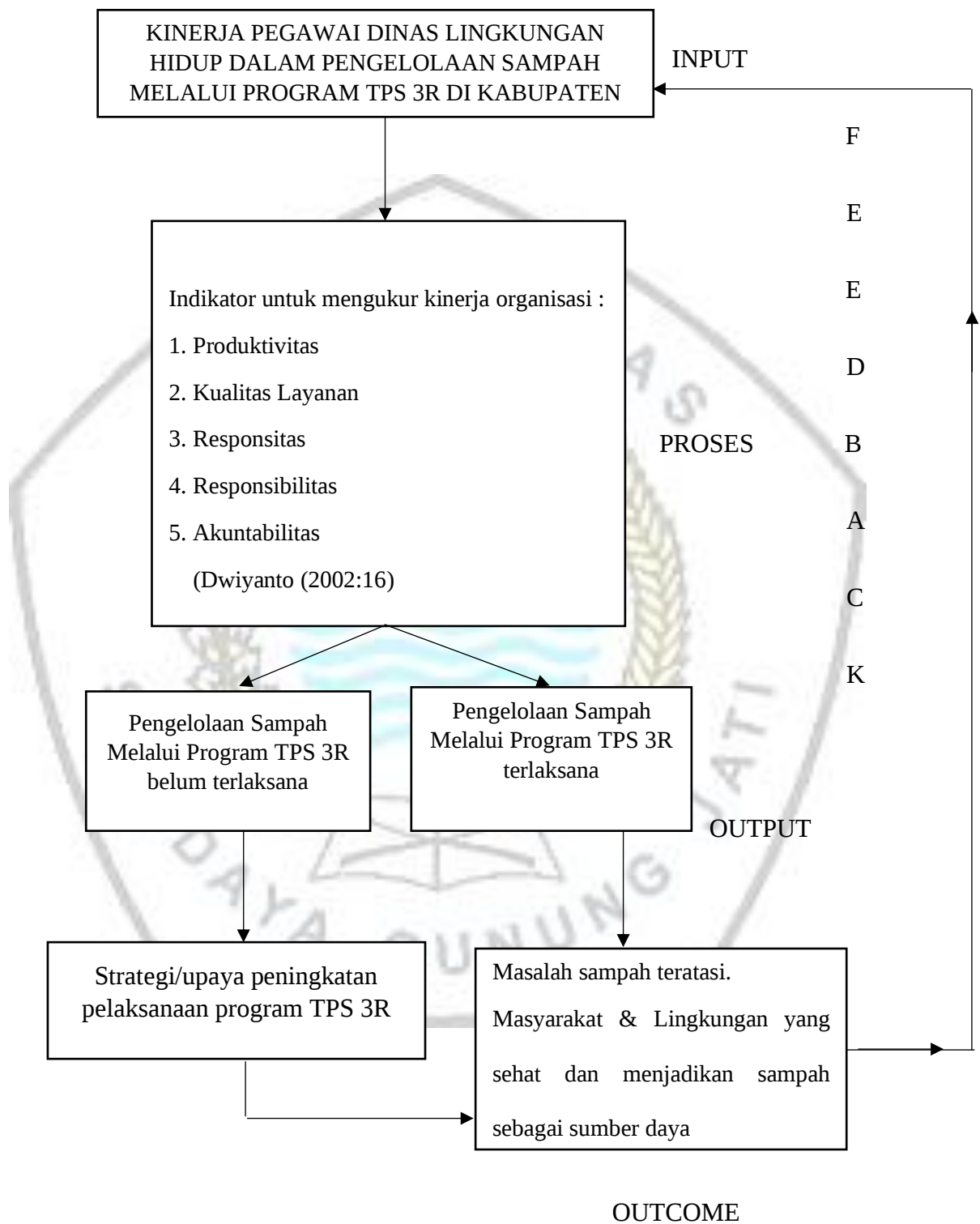
- a. Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran, seperti : orang, dana, waktu, material, dll.
- b. Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Manfaat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat di akses oleh publik.
- e. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang di mulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dwiyanto (2002 : 16) mengemukakan terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi yaitu :

- a. Produktivitas : Dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Kualitas Layanan : Dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
- c. Responsivitas : Dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas : Menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- e. Akuntabilitas : Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders.

Dalam penelitian yang menjadi kerangka teorinya adalah Kinerja, yaitu Indikator untuk mengukur Kinerja organisasi dalam Dwiyanto (2000:16) pada buku Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

a. Kinerja

Menurut Bernardin (dalam Sudarmanto, SIP, Msi “Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM” 2001:143) kinerja merupakan catatan *hasil* yang diproduksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Dari definisi tersebut, Bernardin menekankan pengertian Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat (*trait*) dan perilaku.

b. Pegawai

Pegawai adalah kata benda berupa orang-orang atau sekelompok orang yang mempunyai status tertentu karena pekerjaannya (Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd : 2012).

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pegawai adalah sumber daya manusia yang menyebabkan kelangsungan hidup suatu organisasi atau lembaga (dalam Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd dan Dr. Nina Lamatenggo, S.E., M.Pd “Teori Kinerja dan Pengukurannya” 2012:97).

c. Pengelolaan

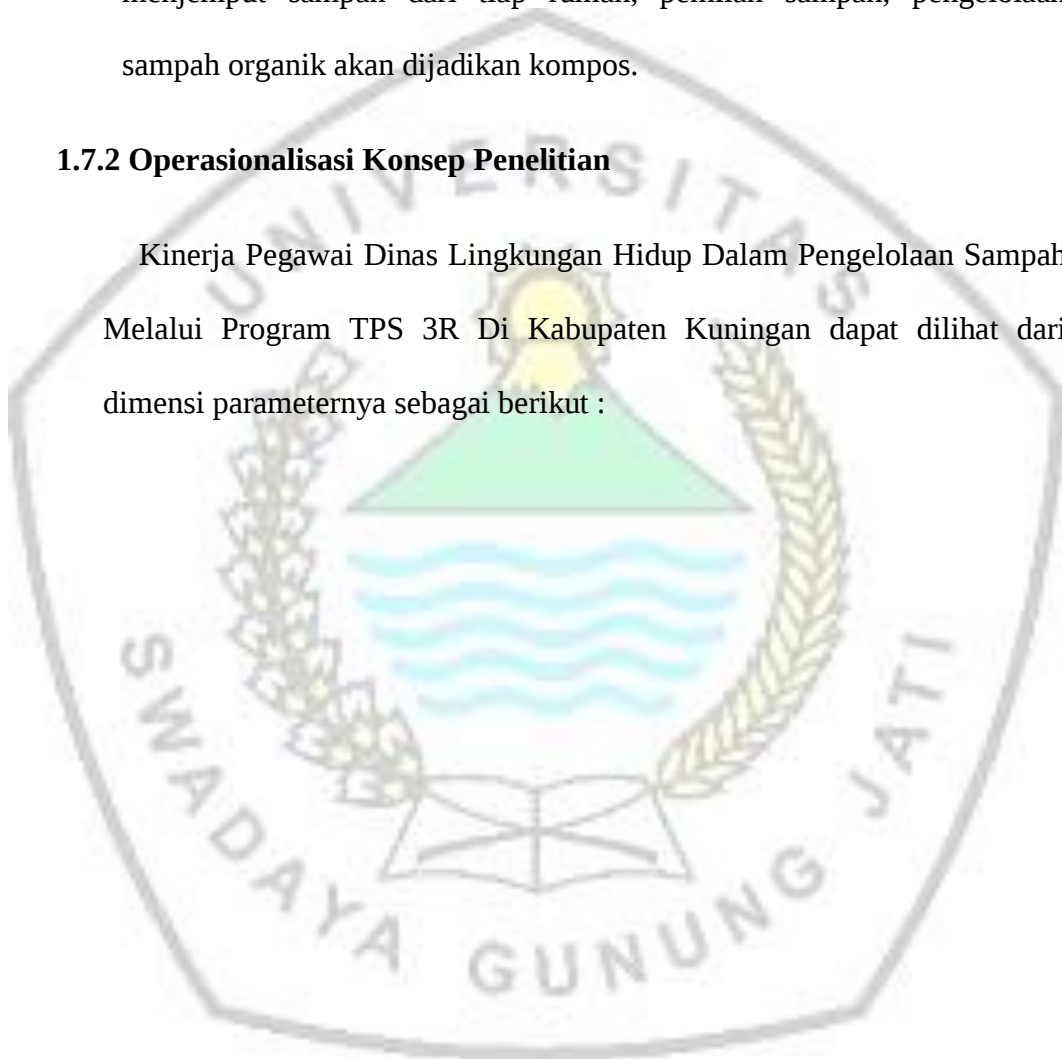
Merupakan soft skill atau Keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain. Menurut (Sondang P. Siagian, 1997:86)

d. TPS 3R

(Tempat Pengolahan Sampah) adalah tempat untuk dilaksanakannya kegiatan *Reduce* (pengumpulan) , *Reuse* (pemilahan, penggunaan ulang), dan *Recycle* (pendauran ulang). Pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik akan dijadikan kompos.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program TPS 3R Di Kabupaten Kuningan dapat dilihat dari dimensi parameternya sebagai berikut :



Tabel 1

Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Sudarmanto, SIP, Msi. (2009:16)	1. Produktivitas	1. Mengukur tingkat efisiensi 2. Efektivitas pelayanan 3. Tingkat pelayanan publik
	2. Kualitas Layanan	1. Mengukur kepuasan masyarakat
	3. Responsivitas	1. Mengukur kemampuan organisasi 2. Mengenali kebutuhan masyarakat 3. Menyusun agenda 4. Prioritas pelayanan 5. Mengembangkan program-program pelayanan publik 6. Aspirasi masyarakat
	4. Responsibilitas	1. Mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik
	5. Akuntabilitas	1. Tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 2. Nilai-nilai 3. Norma eksternal

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam Moleong (2016: 4) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang di kumpulkan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program TPS 3R Di Kabupaten Kuningan. Selain berpedoman pada teori-teori yang sudah ada, penulis juga melakukan wawancara untuk mengetahui relevansi antara teori dengan kenyataan lapangan.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yakni dengan menetapkan para pelaksana melalui program TPS 3R di Kabupaten Kuningan. Adapun kriteria informan yang akan dijadikan sumber informasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci (*Key Informan*) yakni orang yang mengetahui banyak informasi serta pihak pelaksana (*operator*) program sebagai pemangku tanggung jawab dalam pelaksanaan program TPS 3R di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Informan ini adalah Bapak Aman, SE sebagai Kasi Pengelolaan Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan.

2. Informan Pendukung yaitu informan yang menerima program TPS 3R yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kuningan yaitu masyarakat pengguna TPS 3R sebagai penggerak yang menjalankan program tersebut.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini ada dua macam data untuk mendapatkan data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari hasil orang lain. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti ini melalui wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan/literatur

Yaitu teknik pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu dari buku-buku, arsip, laporan dinas, monografi, surat kabar, internet, dan sumber-sumber tertulis lain.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan terdiri dari : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian, observasi dalam penelitian kualitatif sebaiknya dilakukan dengan cara observasi partisipatif. Namun jika hal itu kurang memungkinkan maka peneliti dapat melakukan observasi non-partisipatif tetapi dengan cara pengamatan mendalam (*depth observation*).
- b. Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan informan kunci dan informan pendukung, wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan secara mendalam, wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang benar-benar lengkap, sehingga peneliti dapat melakukan analisis dengan mendalam.

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari segala sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk foto, dokumentasi, atau lain-lain.

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik Pengujian Keabsahan Data dalam penelitian kualitatif ini sering disebut dengan uji validitas pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri yang dilengkapi dengan data-data yang dihasilkan dari buku, dan lain-lain.

Teknik Pengujian Keabsahan Data yang digunakan peneliti adalah Triagulasi menurut Moleong (2016:330) triagulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triagulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang di katakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintah

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai dengan akhir penelitian, menurut Moleong (2016:260), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan deskriptif, dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data, yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian hal-hal yang pokok yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian itu sangat banyak tetapi tidak semua data itu akan digunakan. Oleh karena itu, data itu harus di reduksi (dipilih dan dipilah). Data yang dipilih adalah data yang relevan dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak relevan dibuang (di *drop out*).

2. Display Data, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, label, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan fokus dan masalah penelitian yang disajikan.
3. Verifikasi Data, yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data yang dikumpulkan, kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan, dan persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas.

1.9 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan yang beralamat di jalan RE.Martadinata Nomor 256 Ancaran-Kuningan dan Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.

Adapun alasan penulis memilih penelitian tersebut karena :

1. Adanya masalah program TPS 3R yang belum berjalan dengan optimal.
2. Adanya data yang mendukung dalam penelitian.

